

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan adalah ketersediaan bahan makanan atau pangan dimana setiap individu mampu memperolehnya sebagai kebutuhan dasar. Ketahanan pangan dapat tercipta jika individu mendapatkan kebutuhan pangan atau makanan yang bergizi atau memberikan manfaat untuk dirinya serta aman untuk dikonsumsi. Sebagai negara agraris, Indonesia tentu memiliki banyak sumber daya alam yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun seiring berjalannya waktu kondisi ketahanan pangan di Indonesia kian mengkhawatirkan karena konversi lahan atau alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif dan berdampak kepada penurunan produksi produk pangan. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, sehingga menuntut lebih banyak lagi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi serta beragamnya permasalahan pangan yang berkembang di berbagai wilayah.

Hal ini tentunya menjadi kewajiban serta tugas bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia. Kebijakan – kebijakan yang efisien diperlukan untuk mengatasi beragam permasalahan diatas serta perlu perencanaan yang baik setidaknya meminimalisir atau menghilangkan masalah ketahanan pangan dari tahun ke tahun seperti : (1) tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen (yang menyebabkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha dan pelaku utama), (2) ketidakcukupan pasokan pangan disuatu wilayah, (3) rantai distribusi pemasaran produk pangan terlalu panjang dan (4) harga produk anjlok saat panen raya serta harga produk naik saat ketersediaan produk sedikit (fluktuasi harga).

Fluktuasi harga bahan pangan di Indonesia merupakan hal yang biasa terjadi disetiap tahunnya terutama pada beberapa kesempatan seperti hari besar keagamaan, dan lainnya. Fluktuasi harga pangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam pembentukan angka inflasi. Dari sisi produksi, sesuai dengan karakteristik produk pertanian pada umumnya. Beberapa penyebab terjadinya fluktuasi harga adalah karena ketidakpastian dalam produksi yang diakibatkan oleh musim panen, gangguan alam serta pengaruh perdagangan

pangan domestik dan global. Selain diakibatkan oleh faktor – faktor produksi, fluktuasi harga pangan juga dipengaruhi oleh sistem distribusi pangan yang berlangsung untuk setiap komoditas pangan. Rantai pasok komoditas pangan yang berjalan secara efisien berperan penting dalam pembentukan harga yang adil bagi seluruh pelaku yang berperan di dalam rantai pasok komoditas pangan. Kondisi ini akan menguntungkan baik bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen. Namun sebaliknya, ketidakefisienan dalam rantai pasok yang antara lain disebabkan oleh rantai pasok yang terlalu panjang atau adanya pihak dalam rantai pasok yang mempunyai kekuatan untuk menentukan harga akan menyebabkan kerugian baik bagi petani maupun konsumen. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menjawab permasalahan ini oleh Kementerian Pertanian melalui program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang di inisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/produsen dan di tingkat konsumen. Melalui kegiatan ini, gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan dalam kegiatan ini digunakan untuk memperkuat permodalan untuk menyerap gabah yang diproduksi petani dengan harga minimal sama dengan harga pangan pokok (HPP). Sehingga gapoktan dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya. Bantuan pemerintah juga digunakan untuk mendukung pengolahan pasca panen sehingga gapoktan dapat menyediakan beras berkualitas baik dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Program PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga saat ketersediaan pangan sedikit. Pada sisi pemasaran, gapoktan difasilitasi membentuk kemitraan dengan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan lembaga distribusi yang langsung

bersentuhan dengan masyarakat. Mekanisme pemasaran melalui TTI akan mempendek rantai pasok komoditas pangan sehingga tercipta margin keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pihak di dalam rantai pasok dan menjaga kepastian harga dan pasokan bagi produsen dan konsumen (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kecamatan Nainggolan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Samosir. Kecamatan Nainggolan terdiri atas 15 desa termasuk salah satunya yaitu Desa Sibinor Ompu Ratus. Desa Sibinor Ompu Ratus adalah Salah satu wilayah yang juga termasuk kedalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Program PUPM tersebut memiliki sasaran yaitu Gapoktan Lestari Tani yang sudah melakukan pemasaran produk beras kepada Toko Tani Indonesia terhitung sejak tahun 2018. Selain itu, desa Sibinor Ompu Ratus memiliki luas wilayah yaitu 387 Ha (3,87 km²) dengan jumlah penduduk yaitu 660 jiwa. Luas panen padi sawah pada tahun 2017 yaitu seluas 96 Ha dengan produksi sebanyak 294,5 Ton (BPS Kecamatan Nainggolan dalam angka, 2018).

Keberhasilan program pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat tani. Menurut Madrie *dalam* Putra (2017) Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan yang nantinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang merupakan kondisi yang ada di dalam diri orang tersebut dan faktor yang merupakan kondisi yang ada pada suasana lingkungan orang yang bersangkutan. Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tidak akan berjalan lancar tanpa partisipasi petani (petani anggota gapoktan). Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sangatlah sulit dan rendah. Rendahnya partisipasi akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga dalam kegiatan PUPM partisipasi aktif dari petani sangat diperlukan. Bentuk keikutsertaan masyarakat atau petani yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penerima hasil manfaat serta dalam mengevaluasi program.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga mengangkat judul pengkajian yaitu **Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan program pertanian membutuhkan partisipasi dari petani. Adanya partisipasi petani pada suatu program diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Elizabeth (2008), menyatakan bahwa partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat/petani di pedesaan. Selain itu partisipasi petani juga diharapkan dapat menggugah kesadaran tentang keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan pertanian di pedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Partisipasi petani juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan meningkatkan tingkat partisipasinya sehingga faktor – faktor tersebut diantaranya faktor pendidikan non formal, akses informasi, pengetahuan petani tentang program, pendapatan, motivasi dan kekosmopolitan terhadap program tersebut. Partisipasi petani tersebut memiliki beberapa tahap diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Oleh karena itu rumusan masalah dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir ?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
2. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

D. Manfaat

Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengkajian ini, maka pengkajian bermanfaat untuk :

1. Bagi Mahasiswa

Pengkajian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Terapan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan.

2. Bagi Pemerintah atau Stake Holder lainnya

- a. Pengkajian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi tentang partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
- b. Pengkajian ini dapat menjadi landasan dan bahan pertimbangan bagi penyelenggaraan penyuluhan tentang partisipasi petani dalam program pemerintah di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

E. Hipotesis

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah disampaikan serta didukung dengan beberapa informasi dan hasil pengamatan awal di lokasi, maka dapat dibangun suatu hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari identifikasi masalah yang ada. Adapun hipotesis dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga partisipasi petani di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) rendah.
2. Diduga faktor pendidikan non formal, akses informasi, pengetahuan petani tentang program, pendapatan, motivasi dan kekosmopolitan mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.